



AWF Ambil Bagian dalam Pendidikan
Sekolah Kaki Gunung di Bogor

Hal 10

KELUARKAN BEJTONG DARI ZONA TAMBRANG!



Warga khawatir, aktivitas pertambangan skala besar ini akan menghancurkan hutan dan sungai, merusak tradisi dan kebudayaan setempat, hingga memicu konflik sosial.

Hal 3

Salam Lahan Basah

KAWASAN Beutong Ateuh Banggalang adalah sebuah kecamatan yang berada di lembah kaki Gunung Singgah Mata di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu kawasan hutan yang terakhir di Asia Tenggara. Selain keindahan alam dan kepentingan hutan bagi anekaragam hayati dan iklim global, Beutong mempunyai makna sejarah istimewa.

Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/KTUN/LH/2020 tahun 2020 yang mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) seluas 10.000 hektar dari kawasan hutan di Beutong Ateuh Banggalang.

Perjuangan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang dalam upaya mereka menolak segala bentuk industri pertambangan emas di daerah mereka telah berjalan dari waktu ke waktu dan sepertinya tidak akan pernah berhenti sampai hari ini.

Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata Pemerintah kembali mencoba untuk memberikan hak atas permohonan dan atau usulan pertambangan emas oleh perusahaan lain yaitu PT. Bumi Mentari Energi (PT. BME).

Tak tanggung-tanggung, izin konsesi PT. BME yang diajukan seluas 3.300 hektar itu masuk dalam wilayah kampung di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Namun upaya eksploitasi kawasan Beutong Ateuh Banggalang terus mendapat penolakan dari seluruh elemen masyarakat.

Warga Beutong Ateuh Banggalang telah memutuskan dalam musyawarah tahun 2013 penolakan

kegiatan tambang emas di wilayah mereka. Lalu, tahun 2023, Muspika Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang bersama seluruh masyarakat menolak PT. Bumi Mentari Energi dan perusahaan lainnya yang ingin mendirikan atau membuka tambang di wilayah Beutong Ateuh Banggalang.

Ancaman tetap belum lenyap. Tiba-tiba nampak PT. EMM kembali menunjukkan hasratnya mengeksploitasi tanah dan hutan Beutong. Perusahaan ini telah memasang sebuah plakat besar di depan gedung pemerintahan dengan tulisan "Selamat ulang tahun ke 23 kabupaten Nagan Raya!"

Padahal, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang termasuk kawasan rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan gempa bumi dengan skala VII-XII MMI (Modified Mercalli Intensity).

Pada sisi lain, masyarakat juga berhak untuk bersuara dalam proyek-proyek yang merusak, dan warga lokal atau masyarakat adat berhak atas "Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan."

Kami sangat mendukung penolakan warga Beutong Ateuh Banggalang menolak segala bentuk eksploitasi lahan dan hutan untuk kepentingan pertambangan. Karena bagi kami, ekonomi ekstraktif tambang akan menghilangkan tradisi masyarakat adat sekaligus menghancurkan ruang hidup dan kekayaan ekosistem hutan hujan di kawasan Ekosistem Leuser, salah satu kawasan hutan terakhir di Asia Tenggara. [AWF]



FOTO: AWF | DESIGN: TAURIS

Daftar Isi

Pesisir	Hal. 6
Birdwatching	Hal. 7
Flora	Hal. 8
Rawa	Hal. 11



Dewan Redaksi

Buletin Ginjal Bumi

Penasehat	: Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
Penanggung Jawab	: Direktur Eksekutif AWF
Pimpinan Redaksi	: Yusmadi Yusuf
Staf Redaksi	: Quratul Aina, Muhammad Vikram, Munzir Yunus, Hennizar Hasan, Yunus Thaib
Editor	: Taufik Hidayat
Desainer Grafis	: Tauris Mustafa

Kami secara sukarela menerima sumbangan artikel, hasil observasi, survey, dan foto untuk dimuat pada Buletin Ginjal Bumi ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, maksimal 500 karakter huruf dan spasi.

Kami juga menerima kritik dan saran yang bisa dikirimkan ke Alamat kami:

Dusun Pang Acob Gampong Blangme Kutableng Bireuen Jalan Water, Intake, Aceh, 24358, Indonesia

Telp/WA: +62 852-6067-7080

acehwetland@gmail.com

www.awf.or.id



Keluarkan Beutong dari Zona Tambang!

Teungku Malikul Mahdi, anak mendiang ulama kharismatik Teungku Bantaqiyah menyerahkan petisi kepada Ketua Komisi I DPRA, Teungku Muharuddin di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Selasa (9/9/2025). [DOK: AWF]

SENIN 8 September 2025, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya mendatangi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf di kantornya untuk menyampaikan satu ultimatum; Keluarkan Beutong dari Zona Tambang!

Kedatangan masyarakat Beutong ini turut didampingi delegasi Aceh Wetland Forum, Selamatkan Hutan Hujan, APEL Green Aceh, Generasi Beutong Ateuh Banggalang, Persatuan Perempuan Beutong, Gayo Rimba Bersatu, dan LSM Lembahtari.

Permintaan agar Beutong dikeluarkan dari zona tambang, delegasi ini juga menyerahkan petisi Selamatkan Beutong dari Ancaman Tambang dengan 85.196 tandatangan dari seluruh dunia kepada Gubernur Aceh.

Untuk diketahui, Beutong Ateuh Banggalang adalah permukiman pinggir hutan di pedalaman Provinsi Aceh. Masyarakatnya memiliki banyak kearifan demi menjaga adat-budaya lokal, dan lebih memilih bertani daripada mendulang emas.

Sejak belasan tahun lalu, kawasan yang masuk dalam ekosistem hutan hujan Leuser ini menjadi incaran mafia tambang.

Masyarakat Beutong pun terusik dengan aktivitas perusahaan PT Emas Mineral Murni (EMM) yang ingin menjadikan daerah ini sebagai kawasan industri pertambangan emas.

Warga khawatir, aktivitas pertambangan skala besar ini akan menghancurkan hutan dan sungai, merusak tradisi dan kebudayaan masyarakat adat, memicu konflik sosial, hingga menggerus ingatan kolektif sejarah bangsa Aceh (kawasan ini dulunya dikenal sebagai basis perjuangan Cut Nyak Dhien melawan penjajah--red).

Di tahun 2013, keresahan masyarakat Beutong memuncak hingga membuat mereka bergerak untuk menentang aktivitas eksplorasi emas oleh PT EMM di wilayah itu.

Mulai dari aksi demonstrasi hingga gugatan hukum pun dilakukan, sampai akhirnya masyarakat menang. Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi nomor 91 K/ KTUN/LH tahun 2020 mencabut Izin Usaha Pertambangan PT EMM yang sebelumnya mendapat konsesi seluas 10.000 hektare di Beutong Ateuh Banggalang.

Namun kawasan ini masih saja menjadi

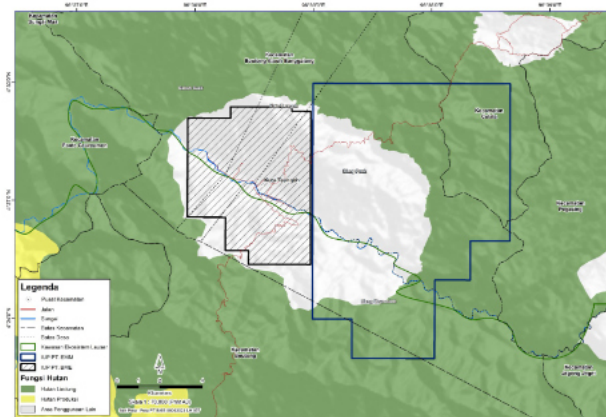
incaran perusahaan pemburu emas. Pada akhir 2023, muncul perusahaan baru yakni PT Bumi Mentari Energi (PT BME) yang mengajukan izin konsesi 3.300 Ha untuk mengeruk emas di Beutong.

Warga pun kembali bergerak. Bersama LSM dan jaringan masyarakat sipil, mereka membuat petisi; "Selamatkan Beutong dari Ancaman Tambang!" yang berhasil mengumpulkan puluhan ribu dukungan masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

Tapi, kesuksesan itu tak membuat ancaman mereda. Tiba-tiba, PT EMM yang IUP-nya sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, mengisyaratkan ingin kembali mencari emas di Beutong.

Pertengahan Juli 2025, perusahaan itu pun mencoba menarik simpati pemerintah setempat dengan memasang sebuah plakat besar di depan gedung pemerintahan yang bertulis ucapan "Selamat Ulang Tahun ke 23 Kabupaten Nagan Raya!"

Masyarakat Beutong tersentak. Bagi warga, pesan itu memberi sinyal kuat bahwa 'musuh sedang mencari teman' dan nafsu serakah mereka ternyata tak pernah pudar.



Peta Beutong. [DOK: AWF]

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mendengarkan tuntutan masyarakat Beutong yang meminta kawasan itu dikeluarkan dari zona tambang nasional, Senin (8/9/2025). [DOK: AWF]

“

Kami datang ke sini untuk meminta dukungan dari wakil rakyat kami agar Beutong dikeluarkan dari zona tambang nasional.”

Selama Beutong masih berstatus sebagai zona tambang, selalu ada jalan bagi mereka untuk kembali.

Serahkan Petisi ke Gubernur dan DPRA

Untuk memastikan para mafia tambang tidak lagi coba-coba untuk kembali ke Beutong, perwakilan warga pun menjumpai Gubernur Aceh pada Senin (8/9/2025), dan menyambangi DPR Aceh keesokan harinya.

Delegasi warga Beutong itu turun gunung ke Banda Aceh dipimpin Teungku Malikul Aziz, anak mendiang ulama kharismatik Teungku Bantaqiyah.

Kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf, masyarakat Beutong menegaskan sikap penolakan terhadap segala bentuk pertambangan. Bahkan untuk pertambangan rakyat sekalipun, yang saat ini digaungkan Pemerintah Aceh.

“Bagi kami, Beutong Ateuh Banggalang harus dikeluarkan dari status zona tambang,” tegas Teungku Malikul Aziz.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat memasukkan wilayah Beutong Ateuh Banggalang dalam kawasan strategis investasi tambang sesuai Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 86 Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Aceh.

Menjawab desakan warga, Gubernur Muzakir Manaf mengatakan; “Kita tidak akan memberikan Beutong untuk pihak luar, sumber daya alam kita hanya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Saat ini,

kami sedang menyiapkan Qanun Pertambangan Rakyat. Masyarakat bisa membentuk koperasi, lalu silakan kelola sendiri,” ujar gubernur yang terkenal dengan panggilan Mualem itu.

Selanjutnya pada Selasa (9/9/2025). Tak puas dengan retorika Mualem yang tampaknya tak paham keinginan masyarakat Beutong, perwakilan warga kemudian mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Selasa (9/9/2025).

“Kami datang ke sini untuk meminta dukungan dari wakil rakyat kami agar Beutong dikeluarkan dari zona tambang nasional,” ulang Teungku Malikul Mahdi, putra bungsu Teungku Bantaqiyah kepada Ketua Komisi I DPRA, Teungku Muharuddin yang didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Teungku Muharuddin pun menanggapi dengan berjanji; “Kami akan meneruskan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat di Jakarta,” ujar politisi Partai Aceh itu.

Audiensi ke Komisi I DPRA itu ditutup dengan menyerahkan dokumen petisi “Selamatkan Beutong dari Ancaman Tambang” yang diluncurkan di website hutanhujan.org dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Italia.

Petisi yang digemakan sejak 2024 itu telah mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional, dan hingga Sabtu (27/9/2025) sudah ditandatangani 85.584 orang dari seluruh dunia yang ikut menyerukan; Selamatkan Beutong dari Ancaman Tambang! [Awf]

Tambang Illegal Dilarang, **Tambang Rakyat Dibuka,** Apa Untungnya bagi Lingkungan?

KAMIS 25 September 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab dengan panggilan Mualem, mengeluarkan pernyataan keras kepada penambang emas ilegal di Aceh, untuk segera keluar dari hutan, sebelum dilakukan langkah tegas.

"Khusus tambang emas ilegal, saya beri waktu mulai hari ini, seluruh tambang emas ilegal yang memiliki alat berat becho harus segera dikeluarkan dari hutan. Jika tidak, maka setelah dua minggu dari saat ini, akan kami lakukan langkah tegas," kata Mualem.

Penegasan tersebut disampaikan Mualem usai mendengar pemaparan Panitia Khusus (Pansus) Tambang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna penandatanganan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025, di ruang rapat paripurna DPRA pada Kamis (25/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Pansus DPR Aceh mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 unit ekskavator beroperasi di kawasan tambang ilegal, dan kuat dugaan ada setoran rutin Rp30 juta per bulan kepada oknum aparat penegak hukum. Sehingga, upaya penertiban tambang ilegal ini akan lebih sulit, dan membutuhkan komitmen dari aparat hukum itu sendiri.

Sementara itu, Pemerintah Aceh yakin bisa menata kawasan tambang emas di Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun mengatakan, langkah ini dilakukan karena tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memberikan manfaat bagi keuangan daerah serta masyarakat Aceh

"Karena itu, segera akan kita buat Instruksi Gubernur terkait penataan penertiban tambang ilegal. Nantinya, penataan dan penertiban tambang ilegal akan kita arahkan untuk dikelola masyarakat dan UMKM atau skema pengelolaan lainnya," ujarnya.

Dan sejak enam bulan lalu, Gubernur Aceh telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 500.10.25/2656 tanggal 11 Maret 2025 perihal Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat.

"Insya Allah, demi rakyat kita akan terus berbenah. Semua ini untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan masyarakat Aceh," katanya.

Namun yang perlu dikritisi adalah, bagaimana tambang rakyat itu akan beroperasi? Dan apa jaminannya pihak yang mendapat izin itu, nantinya akan melakukan penambangan emas tanpa merusak lingkungan?(AWF)

HILANGNYA TANAMAN PANTAI DI PESISIR BIREUEN

Kondisi pesisir Samalanga yang tidak lagi memiliki hutan mangrove karena pepohonan pantai ditebangi untuk pembuatan tambak. [FOTO: AWF/YUNUS]

SAMALANGA merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang paling parah dihantam tsunami 26 Desember 2004 silam. Musibah itu menelan banyak korban jiwa dari warga Desa Meunasah Lancok yang berada di pesisir barat Kabupaten Bireuen. Namun selain menelan korban jiwa, musibah itu juga memberangus ratusan hektare tanaman pantai. Sehingga kawasan ini menjadi rentan terhadap terjangkit badai khususnya saat tiba musim angin barat.

Sebelum tsunami menghantam Aceh, di pesisir pantai Samalanga masih banyak ditemui tanaman pantai seperti tanaman

bakau, cemara dan nipah. Namun setelah tsunami, pepohonan pantai itu nyaris hilang.

Pada masa tanggap darurat pascatsunami, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional yang menanam kembali Bakau dan Cemara di pesisir Samalanga. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, pepohonan itu ditebang oleh masyarakat yang membuka tambak untuk budidaya ikan dan udang.

Sekarang sudah tidak lagi pohon bakau, cemara dan nipah di sepanjang pantai Samalanga, akibatnya daerah ini semakin sering diterjang angin kencang..

“Memang, dalam sepuluh tahun terakhir, pohon-pohon pantai seperti bakau, cemara dan nipah di sepanjang pantai itu ditebangi untuk membuka tambak atau agar petani tambak mudah memantau orang-orang masuk ke areal tambak mereka, mengantisipasi pencurian udang dan ikan di tambak tersebut,” ungkap Rahmat, Kepala Desa Meunasah Lancok.

Untuk mengembalikan hutan mangrove di kawasan pantai Samalanga ini, perlu kesadaran dari masyarakat untuk tidak menebang tanaman pantai yang ada, dan perlu aksi penanaman kembali. [YUNUS]

BIRDWATCHING TRAINING DI PAYA NIE: MENUMBUHKAN KESADARAN KONSERVASI LEWAT PENGAMATAN BURUNG



(**Atas**) Peserta Birdwatching Training melakukan pengamatan di kawasan lahan basah Paya Nie. (**Bawah**) Pembekalan materi bersama narasumber. [FOTO-FOTO: AWF]

PADA Kamis (11/9/2025), Aceh Wetland Forum (AWF) menyelenggarakan kegiatan Birdwatching Training di kawasan lahan basah Paya Nie, dengan menghadirkan narasumber dari Koalisi Selamatkan Hutan dan Lahan Aceh (KSLHA) dan dari Aceh Birding Club yang sudah berpengalaman dalam penelitian dan pengamatan burung.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan generasi muda dalam mengenali serta memahami pentingnya keanekaragaman burung di Paya Nie. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi sarana edukasi konservasi sekaligus penguatan komunitas lokal agar dapat terlibat dalam upaya menjaga ekosistem lahan basah.

Dalam Birdwatching Training ini, peserta mendapatkan materi berupa:

 **Pengenalan Burung di Lahan Basah** – jenis-jenis burung khas Paya Nie, termasuk burung air dan burung migran.

 **Teknik Identifikasi Burung** – melalui ciri morfologi, suara, dan perilaku.

 **Penggunaan Peralatan** – cara menggunakan teropong (binoculars), kamera, dan buku panduan lapangan.



 **Pencatatan dan Monitoring** – metode mencatat hasil pengamatan, baik secara manual maupun dengan aplikasi digital.

 **Etika Birdwatching** – menjaga jarak, tidak mengganggu satwa, serta tidak merusak habitat.

Selain mendapat teori di ruangan, peserta juga diajak langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan burung di habitat alami. Aktivitas praktik ini memberi pengalaman nyata sekaligus membangkitkan antusiasme peserta untuk lebih dekat dengan alam.

Narasumber dari KSLHA pun berbagi pengalaman mengenai pentingnya riset burung dan kaitannya dengan kesehatan

ekosistem. Mereka menekankan bahwa burung bukan hanya indah untuk diamati, tetapi juga berperan penting sebagai indikator lingkungan. Jika populasi burung terganggu, itu menjadi sinyal adanya masalah pada ekosistem.

Melalui kegiatan ini, AWF berharap agar masyarakat Paya Nie, khususnya generasi muda, semakin peduli dan mampu berperan aktif dalam menjaga kawasan lahan basah.

Pelatihan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam mengembangkan potensi ekowisata berbasis burung di Bireuen, yang pada gilirannya bisa memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi komunitas lokal. (Munzir)

JEJAK PADI RAWA, DARI SUNGAI YANGTZE HINGGA PAYANIE



Ilustrasi - Panen wild rice di Amerika Utara, menggunakan sampan di rawa-rawa (Dok: S. Eastman, USA)

PADA ilustrasi di atas, kita bisa melihat tiga orang di atas sampan sedang memanen wild rice di tengah rawa. Dengan alat kayu sederhana, mereka mengetuk bulir padi hingga jatuh ke dalam perahu. Pemandangan ini, meski jauh dari benua amerika utara, ternyata memiliki kemiripan dengan budaya masyarakat Aceh zaman dahulu.

Padi rawa, atau yang kerap disebut “padi liar” (wild rice) dalam bahasa ilmiah disebut dengan *Zizania aquatica*, memang punya jejak panjang dalam sejarah manusia.

Di Amerika Utara, tanaman ini banyak tumbuh di perairan dangkal, rawa-rawa, dan tepian sungai, sebagaimana dilaporkan oleh Moose Lake Wild Rice News (2025). Bagi masyarakat adat di Amerika, padi rawa atau wild rice bukan sekadar tanaman liar. Ia adalah makanan pokok yang menyelamatkan hidup banyak generasi. Di Wisconsin, misalnya, suku Menominee bahkan dijuluki “the Wild Rice People” oleh orang Eropa. Setiap musim gugur, mereka menggunakan sampan dan memanen padi tersebut secara tradisional menggunakan kano.

Namun, meski sama-sama dikenal sebagai padi rawa, spesies yang tumbuh di Aceh

berbeda dengan yang terdapat di Amerika Serikat. Secara ilmiah, padi rawa Amerika diklasifikasikan sebagai *Zizania aquatica*, sedangkan padi rawa di Aceh merupakan keturunan dari *Oryza sativa* L. Perbedaan ini terlihat jelas pada rasa, bentuk bulir, hingga karakteristik batangnya.

Berdasarkan catatan arkeologi menunjukkan bahwa butiran padi berusia sekitar 8.000 tahun telah ditemukan di Lembah Sungai Yangtze, Tiongkok bagian timur (Kontak, C. S., Sejarah Penyebaran Budidaya Padi). Dari kawasan tersebut, padi kemudian menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur Taiwan dan Filipina. Migrasi penutur Austronesia pada 2000–1500 SM membawa praktik bercocok tanam hingga ke Nusantara. Sejak itu, penanaman padi di rawa-rawa maupun lahan kering menjadi bagian penting dalam pemukiman Neolitik di Indonesia.

Bahkan Saat ini, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga di dunia (Santema, 2024).

Padi Rawa di Payanie

Jejak sejarah panjang itu menemukan cerminan lokal di Aceh. Salah satunya di Rawa Payanie, Kabupaten Bireuen, tempat padi rawa pernah tumbuh subur hingga dekade 1980-an. Di kawasan ini, praktik bercocok tanam yang telah berlangsung selama ribuan tahun tetap terpelihara dan menjadi bagian penting kehidupan masyarakat.

Kenangan tentang kejayaan padi rawa terekam kuat dalam ingatan Ibu Salbiah, warga asli Bireuen. Ia masih mengingat jelas bagaimana pada tahun 1980-an padi rawa tumbuh tinggi dan subur di Rawa Payanie. Menurutny, rawa tersebut tidak hanya menghasilkan beras berkualitas, tetapi juga menyediakan ikan melimpah serta berfungsi sebagai tabungan air alami bagi masyarakat sekitar.

Kenangan itu tergambar jelas ketika Ibu Salbiah memperagakan tinggi padi rawa pada masanya. Menurutny, padi rawa bisa

tumbuh hingga sekitar 1,5 meter, jauh lebih tinggi dibanding varietas padi sawah yang umum ditanam saat ini.

Kala itu, Ibu Salbiah bersama neneknya kerap memanen padi rawa. Kenangan itu begitu membekas hingga kini. "Dulu ada padi meuhamboe, padi roe, si kuneng, dan padi si beuhe. Baunya harum, rasanya enak, bahkan tanpa lauk pun sudah cukup," ujarnya.

Namun, cerita itu perlahan menjadi bagian dari masa lalu. Sejak era Revolusi Hijau di masa Presiden Soeharto, banyak rawa dialihfungsikan menjadi sawah dengan varietas berumur pendek. Padi rawa yang hanya dapat dipanen sekali setahun kalah bersaing dengan padi sawah yang bisa dipanen tiga kali setahun. Akibatnya, keberadaan padi rawa makin jarang ditemui dan generasi muda hampir tidak mengenalnya lagi.

Kondisi ini memunculkan perhatian kalangan pegiat lingkungan. Aceh Wetland Forum (AWF) mencatat bahwa pengalaman masyarakat Aceh memiliki kesamaan dengan tradisi suku Menominee di Amerika Utara.

Kedua budaya sama-sama hidup berdampingan dengan alam, bahkan teknik panennya serupa menggunakan sampan. Bedanya, masyarakat Menominee hingga kini masih membudidayakan wild rice sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber pangan mereka. Sementara itu, padi rawa khas Aceh justru hilang dan tidak lagi dibudidayakan, sehingga hanya tersisa dalam ingatan generasi terdahulu.

Atas dasar itulah, AWF berupaya menelusuri kemungkinan masih adanya bibit padi rawa di Aceh. "Kami berharap dapat menemukannya kembali. Padi rawa bukan hanya identitas masyarakat, tetapi juga bukti penting konservasi rawa," kata Qurratul Aina, staf kampanye AWF.

Jika bibit tersebut berhasil ditemukan, AWF menargetkan upaya budidaya untuk menghidupkan kembali padi rawa sebagai bentuk salah satu konservasi. Lebih jauh, padi ini diharapkan mampu mengangkat identitas lokal sekaligus menjadi komoditas yang bernilai, bahkan berpotensi dipasarkan ke tingkat internasional. [AINA]



Ibu Salbiah memperagakan tinggi padi rawa zaman dulu yang tingginya bisa mencapai 1,5 meter. [FOTO: AWF/AINA]

AWF Ambil Bagian dalam Pendidikan Sekolah Kaki Gunung di Bogor



Perwakilan AWF saat mengikuti Sekolah Kaki Gunung di Bogor. [FOTO DOK: AWF]

hingga forum lokal. Salah satunya adalah perwakilan dari Aceh Wetland Forum (AWF), organisasi yang konsisten memperjuangkan pelestarian ekosistem lahan basah di Aceh.

“Sekolah Kaki Gunung memberikan ruang belajar yang berbeda. Selain materi kelas, kami juga dilibatkan langsung dalam praktik lapangan. Dari sini, saya melihat bagaimana perjuangan masyarakat di berbagai daerah menghadapi tantangan lingkungan mereka. Hal ini memperkaya wawasan saya sekaligus memperkuat komitmen untuk melanjutkan kerja-kerja konservasi di Aceh,” ujar Vikram, perwakilan AWF.

Memperkuat Solidaritas Gerakan Lingkungan

Selain memperluas pengetahuan, sekolah ini juga memperkuat solidaritas antaraktivis. Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, peserta saling belajar mengenai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, mulai dari deforestasi, alih fungsi lahan, ekspansi industri ekstraktif, hingga ancaman terhadap ekosistem hutan dan rawa.

Program ini juga menegaskan pentingnya membangun jaringan antaraktivis lingkungan di tingkat nasional. Hubungan yang terjalin selama pendidikan diharapkan dapat memperkuat sinergi gerakan lingkungan di masa mendatang.

“Perubahan tidak bisa dicapai secara individu. Diperlukan kekuatan kolektif yang lahir dari kerja bersama. Sekolah Kaki Gunung menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring dan membangun komitmen bersama demi kelestarian lingkungan,” ujar salah seorang penyelenggara.

Harapan ke Depan

Melalui keterlibatannya dalam Sekolah Kaki Gunung, Aceh Wetland Forum berharap dapat memperkuat kapasitas organisasi sekaligus memperluas jejaring advokasi lingkungan, terutama untuk mendukung upaya pelestarian lahan basah di Aceh.

Bekal pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperoleh di Bogor menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional. [VIKRAM]

PULUHAN pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti pendidikan alternatif Sekolah Kaki Gunung yang digelar di Bogor.

Program ini diprakarsai oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu lingkungan, antara lain Forest Watch Indonesia (FWI), Sayogyo Institute (SAINS), Independent Forest Monitoring (IFM), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), serta Rettet den Regenwald (RdR).

Selama tiga bulan penuh, peserta ditempa dengan rangkaian kegiatan belajar yang intensif. Proses pendidikan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, memadukan pembelajaran di kelas dengan praktik langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai keterhubungan antara manusia, ekosistem, serta kebijakan yang berdampak pada ruang hidup masyarakat di sekitar hutan dan kawasan kaki gunung.

Belajar dari Kelas hingga Lapangan

Pada minggu pertama hingga keempat, peserta mendapatkan materi di ruang kelas dengan lokasi bergantian di kantor FWI, RMI, Sayogyo Institute, HuMa, dan WGII. Materi yang disajikan meliputi dinamika sosial-ekologi, analisis kebijakan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, hingga metode pemetaan partisipatif. Seluruh sesi dipandu oleh fasilitator berpengalaman dan menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Memasuki minggu kelima, peserta diarahkan untuk turun langsung ke lapangan. Observasi dilakukan di beberapa lokasi yang telah ditentukan oleh panitia, dengan fokus pada praktik pemetaan wilayah serta pengenalan lebih dekat terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat setempat. Kegiatan ini memberi pengalaman nyata bagi peserta untuk menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik di lapangan.

Peserta Sekolah Kaki Gunung datang dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas adat, NGO lingkungan, lembaga penelitian,

Rawa Paya Nie Makin Dangkal, Habitat Burung Air Terancam Hilang



Rawa Paya Nie yang saat ini mengalami pendangkalan.

[FOTO-FOTO: AWF/MUNZIR]

Paya Nie, salah satu kawasan rawa di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen yang dikelilingi sembilan desa dan mencakup dua wilayah Kemukiman yakni Mukim Teuku Chiek Umar dan Mukim Teuku Chiek Dimanyang.

Rawa Paya Nie saat ini menghadapi masalah serius, dimana kedalaman air yang semakin menyusut dalam beberapa tahun terakhir, dan memicu kekhawatiran para pemerhati lingkungan karena mengancam keberlangsungan biota rawa dan spesies burung air yang bergantung pada ekosistem ini.

Menurut pantauan warga dan tim peneliti lokal, dasar rawa kini terekspose di banyak titik yang sebelumnya tertutup air. "Sedimentasi yang kian tebal membuat air hanya setinggi lutut, padahal dulu bisa lebih dari dua meter," ungkap Bukhari, anggota kelompok pemerhati lingkungan Paya Nie, Kamis (11/9/2025).

Pendangkalan rawa ini dipicu berbagai faktor, di antaranya; aliran sedimen dari daerah hulu, pembukaan lahan pertanian, serta pengambilan air untuk irigasi yang tidak terkontrol. Perubahan iklim yang memanjangkan musim kemarau juga memperburuk kondisi.

Dampaknya langsung terasa bagi kehidupan ikan, udang rawa, dan plankton. Penurunan

jumlah biota air ini memutus rantai makanan bagi burung pemakan ikan seperti kuntul dan bangau.

Burung migran yang biasa singgah di rawa ini pun mulai jarang terlihat. "Tahun ini populasi burung air menurun drastis, kami hanya mendapati setengah dari jumlah yang biasanya," kata Heri Tarmizi, peneliti burung air dari Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh (KSLHA).

Pemerintah daerah menyatakan akan segera menyiapkan langkah penyelamatan. Program rehabilitasi hulu dan normalisasi rawa dengan pengerukan selektif, saat ini sedang disusun, disertai rencana edukasi masyarakat untuk menjaga kualitas air.

Pemerhati lingkungan pun mendesak agar rencana ini dipercepat. "Rawa Paya Nie bukan hanya rumah bagi burung air, tetapi juga penyangga banjir dan sumber air masyarakat. Jika dibiarkan, kerusakan ini akan merugikan semua pihak," tegas Bukhari.

Masyarakat diimbau agar terlibat aktif dalam pengaturan pemakaian air irigasi. Tanpa upaya bersama, para ahli memperingatkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Rawa Paya Nie bisa kehilangan fungsinya sebagai habitat alami burung air yang menjadi kebanggaan daerah, jika tidak ditangani dengan serius.

[HENNIZAR]



tokopedia



Beli Produk Online ini dari Toko Aceh Wetland Forum di Tokopedia: